

RE-IDENTITAS KOTA LAMA MAKASSAR

Asmunandar

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Cikal bakal Kota Makassar bisa dirunut jauh ke belakang tepatnya setelah penaklukan Kerajaan Gowa-Tallo oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* disingkat VOC (Perusahaan Dagang Hindia Timur) di tahun 1667. Pasca kemenangan tersebut, Cornelius Speelman memilih satu benteng yang lalu dikenal dengan sebutan Fort Rotterdam (benteng Rotterdam) menjadi pusat kekuasaan sekaligus pusat pemerintahan di bagian timur. Fort Rotterdam inilah yang menjadi titik awal perencanaan kota Makassar. Pemerintah kolonial yang lalu menggantikan VOC melanjutkan pembangunan kota Makassar dengan mendirikan berbagai jenis gedung-gedung untuk menunjang berjalannya pemerintahan dan sekaligus juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam mengatur masyarakat yang berdiam di kota tersebut. Tulisan ini mengajukan tawaran upaya yang diistilahkan sebagai Re-Identitas Kota lama Makassar yang ditujukan untuk memberikan identitas dan jati diri yang lebih mengakar bagi kota Makassar tanpa melestarikan pola kebijakan periode kolonial. Dengan upaya pelestarian kota kuno Makassar ini, dapat menjadi *museum in-site* dan *open space* arsitektur di Kota Makassar. Bagi penduduk kota Makassar, pelestarian bangunan kota kuno Makassar dapat menjadi potret bagaimana kehidupan bersama dibentuk dan mengiringi proses perkembangan Kota tersebut sampai dengan saat ini.

Kata Kunci: Re-Identitas, Kota Kuno Makassar, Pelestarian Budaya

Abstract

The origin of the City of Makassar can be traced far in the past, specifically to the time the Kingdom of Gowa-Tallo was conquered by *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (The East India Company or VOC) in 1667. Following the victory, Cornelis Speelman chose one fort later known as Fort Rotterdam to become the center of power and center of government in the east. This Fort Rotterdam is the origin point of the Makassar city planning. The colonial government later replaced VOC in continuing the development of Makassar city by constructing more buildings to support the administration by issuing policies to regulate the inhabitants of the city. This paper offers what can be called "Re-Identity Makassar Old Town" as efforts to give a rooted identity to Makassar city without reviving the colonial policies. Through these conservation efforts, Makassar can become in-site and open space architectural museum. For the inhabitants of Makassar, the conservation of old buildings in the city can portrait the collective activities in the city and its development processes to this day.

Keywords: Re-Identity, Makassar Old Town, Cultural Conservation

PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan kota yang memiliki sejarah panjang hingga terbentuk seperti sekarang. Awalnya, Kota Makassar merupakan wilayah Kerajaan Makassar, nama lain Kerajaan Gowa. Nama Makassar baru diketahui pada abad ke-14, yang tercantum dalam *Desawarnana* Pupuh XIV. Disebutkan bahwa daerah di sebelah timur Jawa yang dikuasai Majapahit pada pertengahan abad ke-14 meliputi ;

..... “Bantayan, Luwuk, Makasar, Buton, Banggawi, Salayar.....”
(Slametmulyana, 1979; 146).

Pada masa pemerintahan Raja Gowa IX Karaeng Tumapa'risi Kallonna (1512-1548), Kerajaan Gowa dikenal sebagai sebuah kekuatan politik dan pelabuhan perdagangan yang besar, yakni Gowa-Tallo. Dalam catatan perjalanan Tome Pires yang berjudul *Suma Oriental of Tome Pires*, di tahun 1513 mengatakan bahwa orang Makassar telah melakukan perdagangan dengan Malaka, Jawa, Borneo, Siam dan semua tempat antara Pahang dan Siam (Cortesao, 1944: 226).

Kerajaan Gowa pada tahun 1528 membentuk satu kekuasaan dengan Kerajaan Tallo yang berada di sebelah utara Benteng Somba Opu, ibukota Kerajaan Gowa. Persekutuan ini disebut *rua karaeng na se're ri ata* yang berarti "dua penguasa satu rakyat" (Abdurrahim, 1975: 11). Dalam konteks sekarang, Kota Makassar berada diantara pusat Kerajaan Tallo di sebelah utara dan pusat Kerajaan Gowa di sebelah selatan.

Pada masa pemerintahan Karaeng Tumapa'risi Kallonna, nama Makassar mulai dikenal dalam sejarah. Beberapa hal penting yang dilakukan raja ini diantaranya; mengubah daerah Makassar dari sebuah konfederasi antarkomunitas menjadi sebuah negara kesatuan Gowa (Andaya, 2004: 31); menyusun sebuah kitab hukum dan cara mengumumkan perang; Kerajaan Gowa untuk pertama kalinya menjalankan bisnis yang cukup substansial dengan pedagang-pedagang asing, sehingga di Kerajaan Gowa dikenal kata *Syahbandar* atau penguasa pelabuhan yang berasal dari Persia. Ketenaran ini diperkuat pula oleh pelancong Portugis bernama Antonio Paiva yang memindahkan kapalnya ke selatan dari pelabuhan Siang pada tahun 1544 menuju "Gowa yang besar tempat kapal-kapal lebih terlindungi dari terpaan angin". Raja ini pula yang pertama kali didatangi oleh orang-orang Portugis (Reid, 2004: 150).

Sejak itu, Kerajaan Gowa di masa pemerintahan Tumapa'risi Kallonna berkembang menjadi kerajaan maritim. Armada niaganya berada di sepanjang pantai antara muara Sungai Jenebarang dan muara Sungai Tallo di sebelah utara yang disebut Maccini Sombala'. Pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan bebas kerajaan kembar Gowa-Tallo (Makassar) (Mattulada, 1991: 11).

Perkembangan Makassar berkaitan erat dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kejatuhan menyebabkan para pedagang Melayu menyebar ke pelabuhan-pelabuhan lain demi mencari tempat berdagang yang dapat dijalankan secara aman dan menguntungkan. Pedagang Melayu pada awalnya mengungsi dan menetap di Kerajaan Siang (Pangkep), sebelum akhirnya berpindah ke Makassar (Andaya, 2004: 34-35).

Menurut Reid (2004), salah satu faktor yang turut membantu Gowa dalam persaingan menarik patronase saudagar-saudagar Melayu adalah peran Portugis dalam mengkriskan penguasa Siang, yang mengakibatkan para pedagang Melayu yang muslim, yang sebelumnya menetap di Kerajaan Siang mencari tempat lain. Faktor lain berkembangnya Makassar ialah diberinya "jaminan kebebasan" bagi pedagang Melayu untuk menetap di Makassar.

Di akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Makassar telah menjadi pusat perniagaan beberapa negara Eropa dan Cina. Pada masa pemerintahan Tunipalangga Ulaweng Raja Gowa ke X (1546-1565), pedagang Portugis telah meningkatkan hubungan dagang dengan Makassar dan mendirikan perwakilan dagangnya. Bahkan bangsa Portugis telah menetap di Makassar sejak tahun 1532. Jika sebelumnya di Makassar hanya ada perwakilan dagang Portugis, selanjutnya terdapat perwakilan dagang Inggris tahun 1613, Spanyol tahun 1615, Denmark tahun 1618 dan Cina tahun 1619 (Reid, 2004: 156).

Pesatnya kemajuan Kerajaan Makassar yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan pedagang Inggris dan pedagang Portugis, menimbulkan kebencian bagi *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Perusahaan dagang Belanda itu, ingin menguasai perdagangan di Makassar dan tidak menginginkan pedagang dari negara lain berada di Makassar (Poelinggomang, 2002). Namun, keinginan ini mendapat perlawanan keras dari Raja Gowa ke XIV Sultan Alauddin (1593-1639).

Pada tanggal 21 Desember 1666 Cornelis Janszoon Speelman menyatakan perang terhadap Kerajaan Gowa. Perang berlangsung hingga tanggal 18 Nopember 1667, dengan menyerahnya Kerajaan Gowa kepada Belanda. Sultan Hasanuddin sebagai Raja Gowa waktu itu dipaksa melakukan perjanjian dengan pihak Belanda yang disebut Perjanjian Bungaya. Salah satu butir perjanjian adalah menghancurkan seluruh benteng pertahanan Kerajaan Gowa kecuali Benteng Ujung Pandang dan menyerahkan benteng tersebut berikut perkampungan dan lingkungannya kepada VOC. Setelah perang ini, hegemoni Makassar dalam dunia perdagangan maritim akhirnya menurun drastis karena pusat pelabuhan dikuasai oleh VOC.

Speelman, sebagai penguasa Makassar yang baru, memilih wilayah Benteng Ujung Pandang dan daerah sekitarnya sebagai pusat pemukiman baru. Pemilihan didasarkan pada keadaan alam, letak yang strategis, dan sangat cocok untuk dijadikan pelabuhan dibanding benteng-benteng lainnya. Benteng ini diubah namanya menjadi "Rotterdam", yang mengacu pada tempat kelahiran Speelman (Poelinggomang, 2002). Benteng Rotterdam kemudian digunakan sebagai markas tentara dan kantor perwakilan VOC di wilayah nusantara bagian timur. Speelman menata Makassar menjadi empat elemen. Pertama, pusat pemerintahan yang berada di Benteng Rotterdam. Di dalam benteng terdiri dari tembok-tembok batu yang besar, dengan pembagian ruang, blok-blok dan pintu gerbang. Sekitar benteng menjadi lingkungan pemukiman orang Belanda yang eksklusif. Pejabat, pegawai pemerintah dan tentara VOC umumnya bermukim dalam benteng dan wilayah sekitarnya. Kedua, tumbuh dan berkembang pemukiman di sebelah timur laut Benteng Rotterdam. Lokasi ini disebut "perkampungan pedagang dengan perumahan bagi orang-orang asing dan pendatang" atau dikenal dengan *Negory Vlaardingen*. Penghuni kawasan ini adalah pedagang yang berasal dari Eropa, orang Tionghoa dan penduduk asli yang beragama Kristen. Ketiga, yang ikut membentuk struktur dan tata ruang permukiman dalam pusat wilayah Kota Makassar adalah *Kampong Melayu* yaitu kampung yang terdapat di sebelah utara *Vlaardingen*. Nama *Kampong Melayu* melekat dari suku asal penghuninya yaitu orang-orang Melayu. Keempat, yakni *Kampong Beru* atau Kampung Baru, terletak di bagian selatan Benteng Rotterdam, berada di dekat pantai. Di daerah ini berdiam orang-orang dari Asia serta para bekas budak beragama Kristen yang bekerja sama dengan Belanda. Mereka ini dikenal dengan istilah *Mardijkers* (Sumalyo, 1999: 303-306).

Penataan Kota Makassar yang dilakukan oleh Speelman, berkembang hingga menjadi kota metropolitan seperti sekarang. Dengan demikian keberadaan sebuah kota tidak lepas dari sejarah awal perkembangannya dan segala proses yang dilaluinya. Menurut Mumford (1967), perkembangan kota sangat berkaitan dengan fungsi waktu, sehingga

aspek historis memegang peran penting dalam membentuk morfologi kota (Mumford, 1967: Wikantiyoso, 2001). Selain aspek historis, terdapat pula aspek fisik, aspek perencanaan kota, ekonomi, politik dan aspek sosial budaya masyarakat yang turut membentuk wajah kota.

Perkembangan fisik Kota Makassar seringkali hanya memperhatikan model terkini dan tidak memperhatikan elemen-elemen pembentuk kota itu sendiri sehingga banyak elemen penanda kota hilang, dan tergantikan dengan penanda waktu baru, yang berpotensi menghilangkan sejarah. Padahal elemen tersebut merupakan simbol keberadaan budaya masyarakat pendukungnya. Contohnya adalah kekayaan wajah arsitektur yang mencirikan Makassar sebagai kota bersejarah.

Menurut Wikantiyoso (2001), kota sebagai *urban artifact*, akan terus membentuk suatu pola morfologi sebagai implementasi bentuk perubahan sosial budaya masyarakat yang membentuknya. Pola morfologi kota merupakan kesatuan organik elemen-elemen pembentuk kota yang mencakup; (1) Elemen Detail, yang meliputi bangunan, open space dan prasarana kota; (2) Tata Bentuk Kota, mencakup pola tata ruang dan komposisi lingkungan di sekitar kawasan; serta (3) Aspek Peraturan, termasuk totalitas rencana yang memperlihatkan dinamika kawasan kota. Dengan demikian untuk mengungkapkan fenomena perkembangan kota, tidak terlepas dari pembahasan elemen pembentuk kota tersebut beserta kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Namun dinamika perubahan kebudayaan sering hanya memperhatikan model terkini dan menghilangkan kebudayaan masa sebelumnya. Pembangunan fisik Kota Makassar tidak memperhatikan elemen-elemen pembentuk kota itu sendiri sehingga banyak elemen penanda kota hilang, dan tergantikan dengan penanda waktu baru, yang berpotensi menghilangkan sejarah. Padahal elemen tersebut merupakan simbol keberadaan budaya pendukungnya.

Pertambahan jumlah penduduk sangat berperan dalam dinamika perkembangan kota. Pertambahan penduduk sebuah kota selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan ruang, untuk menunjang kenyamanan kehidupan warganya. Fenomena ini mengakibatkan tumbuhnya bangunan baru seperti rumah toko, rumah kantor dan hotel, yang berpotensi menggantikan rumah tinggal masyarakat lokal, mengganggu eksistensi bangunan kuna bersejarah dan berdampak negatif pada usaha-usaha pelestarian bangunan kuna bersejarah. Bangunan kuna, adalah hasil proses sejarah budaya bangsa yang merupakan aset budaya. Aset budaya adalah bukti nyata warisan dan kekayaan budaya bangsa yang sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bagi masyarakat.

Posisi Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan menjadi satelit (*hub*) bagi wilayah Indonesia bagian timur menjadi daya tarik yang kuat bagi para pendatang sehingga mempercepat status Kota Makassar sebagai kota metropolitan. Pusat Kota Makassar menjadi tempat akumulasi penduduk dan aktivitas manusia yang sangat kompleks, sehingga muncul fenomena keterancaman bangunan kuna.

Agar tidak berlangsung secara terus menerus, diperlukan sebuah bentuk pengelolaan kota secara menyeluruh termasuk menghidupkan kembali identitas-identitas budaya Kota Makassar, sebab kota tidak hanya menyangkut fisik dan visual bangunan namun juga menyangkut sosial budaya masyarakat yang bermukim di dalamnya. Identitas budaya yang dimaksud adalah sumberdaya budaya *tangible* maupun sumberdaya budaya *intangible*.

Fenomena terancamnya kelestarian sumberdaya arkeologi akibat perkembangan pembangunan melahirkan sebuah kajian baru dalam arkeologi yakni *Cultural Resource Management* (CRM) yang dalam pengertian luas disebut arkeologi konservasi (Renfrew dan Bahn, 1991: 470). Konservasi sumberdaya arkeologi sangat penting dilakukan karena me-

rupakan bukti yang menarik tentang nilai dan kreativitas manusia pendukungnya, merupakan bukti yang terdokumentasi tentang pemukiman suatu wilayah atau bagaimana hubungan tempat tersebut dengan dunia luar dan sumberdaya arkeologi mempunyai sifat yang langka dan tidak dapat diperbaharui (Pearson dan Sullivan, 1995: 11-12). Dengan demikian konservasi merupakan upaya memelihara suatu tempat, berupa lahan, kawasan, gedung maupun kelompok gedung termasuk lingkungannya. Tempat yang dikonservasi akan menampilkan makna dari sisi sejarah, budaya, tradisi, keindahan, sosial ekonomi, fungsional, iklim dan fisik. Semua itu akan terlihat maknanya pada masa lalu, kepentingan saat ini, serta kelangsungan pada masa mendatang (Danisworo, 1997: 18-19).

Semua sumberdaya arkeologi membutuhkan pengelolaan yang tepat, sesuai dengan jenis dan kondisi keberadaannya. Hal tersebut dimaksudkan agar aset tersebut dapat tetap terlindungi dan terjaga kelestariannya. Upaya pelestarian dianggap penting mengingat bahwa sumberdaya arkeologi adalah bukti-bukti fisik atau sisa budaya yang ditinggalkan oleh manusia masa lampau pada bentang alam tertentu. Bukti-bukti ini berguna untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memahami tingkah laku dan interaksi manusia sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem budaya dan alamnya (Tanudirdjo dan Nayati, 1988: 4).

Guna mendukung upaya konservasi, prinsip konservasi haruslah berlandaskan pada; penghargaan terhadap keadaan semula dari suatu tempat dan sedikit mungkin melakukan intervensi fisik bangunannya; bermaksud untuk menangkap kembali maknanya; suatu bangunan atau suatu hasil karya bersejarah harus tetap pada lokasi historisnya; konservasi menjaga terpeliharanya latar visual yang cocok seperti bentuk, skala, warna, tekstur dan bahan pembangunan dan; kebijaksanaan konservasi yang sesuai untuk suatu tempat harus didasarkan atas pemahaman terhadap makna kulturalnya dan kondisi fisik bangunannya (Kerr, 1985; Eko Budihardjo dan Sidharta, 1989). Sehingga, konservasi areal perkotaan sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam perencanaan perkotaan ke depan.

Paparan mengenai konsep konservasi secara jelas memberi gambaran bahwa konservasi perkotaan mencakup wilayah kota, visual kota dan bangunan yang mempunyai nilai-nilai dan makna sejarah. Faktor nilai sejarah ini dapat digunakan untuk melihat sejarah perkembangan suatu kota dari masa lalu yang masing-masing terwakili oleh pola dan gaya arsitekturnya, juga digunakan sebagai dasar untuk perencanaan ataupun cerminan di masa yang akan datang.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Data sumber daya budaya dibagi mejadi dua bagian. Bagian pertama adalah data sumber daya budaya berwujud (*tangible*) dalam hal ini bangunan bersejarah dan data sumber daya budaya tak berwujud (*intangible*) berupa kesenian tradisional, organisasi sosial dan bahasa.

Secara teknis pengumpulan data yang dilakukan terbagi dua yakni penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Untuk penelitian pustaka pada data sumber daya budaya berwujud dan tak berwujud, diperoleh dari kepustakaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Makassar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, internet, Museum Kota Makassar dan sumber-sumber tertulis yang mendukung.

Bentuk data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut adalah data situs dan bangunan-bangunan bersejarah berupa foto, peta, sejarah bangunan dan data sejarah Kota Makassar. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, pemotretan serta wawancara. Sementara untuk data sumber daya budaya tak benda dilakukan dengan

wawancara dan kajian literatur.

STRATEGI PELESTARIAN DAN RE IDENTITAS

Strategi Pelestarian Sumberdaya Budaya *Tangible* di Kota Makassar

Strategi merupakan metode, rencana yang komprehensif untuk mencapai sasaran atau tujuan berjangka panjang. Kaitannya dengan strategi pelestarian, maka usaha yang ditempuh adalah perlindungan sumberdaya budaya khususnya sumberdaya budaya *tangible*, baik secara hukum maupun secara fisik. Adapun sasaran dan tujuan yang akan dicapai adalah terciptanya keseimbangan antara upaya perlindungan dan pelestarian dengan pemanfaatan secara terus menerus (*sustainable*).

Sesuai dengan sifat dasar sumberdaya budaya yang terbatas (*finite*), rapuh (*fragile*), dan tak terbaharui (*unrenewable*), maka pelestarian sebagai salah satu upaya perlindungan sumberdaya budaya menjadi hal yang utama. Hal ini disebabkan karena sumberdaya budaya memiliki nilai penting dan tidak lepas dari makna kultural masyarakat pendukungnya.

Untuk itu sumberdaya budaya yang memiliki arti khusus selayaknya mendapat perlindungan dari ancaman kerusakan, sehingga sumberdaya budaya dapat tetap difungsikan sebagai media membangun identitas, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan fisik dan perlindungan hukum.

Pelindungan Fisik

Kegiatan perlindungan fisik terhadap bangunan bersejarah mutlak dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan kerusakan dalam rangka melestarikan bangunan tersebut. Upaya pelestarian atau konservasi bangunan bersejarah harus berlandaskan pada kaidah-kaidah arkeologi serta budaya yang melatar belakungnya. Pada pemukiman atau perkotaan, konservasi dilakukan agar suatu tempat atau lokasi dapat dipertahankan sesuai dengan konsep awalnya. Tempat itu diartikan sebagai tanah atau area, gedung atau kelompok bangunan, termasuk lingkungannya.

Sementara yang harus diperhatikan adalah sejarah, budaya atau nilai-nilai tradisional, fungsi sosial dan ekonomi, iklim dan lokasi geografisnya. Dengan demikian konservasi mencoba memelihara, melindungi suatu tempat atau lokasi agar dapat digunakan secara efisien (Danisworo, 1997). Konservasi itu sendiri mencakup beberapa kegiatan yakni adaptasi, restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.

Adaptasi adalah upaya untuk memodifikasi suatu tempat untuk dapat digunakan dengan fungsi yang lebih sesuai. Pengertiannya bahwa kegunaan baru tidak mengubah makna kultural yang melekat pada tempat tersebut. Jadi meskipun ada perubahan fungsi, tapi makna kultural tetap dipertahankan.

Restorasi adalah upaya untuk pemulihan suatu tempat ke kondisi semula dengan tetap menggunakan komponen-komponen asli tanpa menambah dengan komponen baru. Kegiatan ini dapat dilakukan jika diketahui bukti-bukti pendukung guna mengembalikan kepada keadaan aslinya.

Rekonstruksi, adalah upaya untuk menyusun kembali struktur bangunan yang rusak atau runtuh suatu objek ke keadaan yang mendekati aslinya. Upaya ini dapat dilakukan sejauh diketahui bukti fisik dan didukung sumber tertulis.

Rehabilitasi adalah suatu bentuk pemugaran yang sifat pekerjaannya hanya memperbaiki bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Kegiatan rehabilitasi berlaku pada tingka kerusakan yang kesil sehingga bangunan tidak dibongkar secara keseluruhan.

Konsolidasi memiliki prinsip yang hampir sama dengan rehabilitasi. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat bangunan yang mengalami kerusakan ringan, sehingga bangunan tidak dibongkar secara keseluruhan. Dalam prakteknya, kegiatan konservasi dilakukan oleh ahli yang berkompeten dari kalangan arkeolog dan dibantu oleh ahli di bidang arsitektur, agar hasil konservasi bangunan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Langkah ini ditempuh mengingat arkeolog maupun arsitek paham tindakan atau bentuk perlakuan yang akan diterapkan pada bangunan yang akan dikonservasi.

Perlindungan Hukum

Perlindungan secara hukum terhadap sumberdaya budaya merupakan penetapan peraturan yang mengatur secara sah segala bentuk perlakuan terhadap sumberdaya budaya, yang meliputi perlakuan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Guna lebih mengefektifkan perlindungan secara hukum bagi sumberdaya di Kota Makassar, maka dirasa perlu mengesewantahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 1 undang-undang Cagar Budaya beberapa ayat mengatur tentang Pelestarian, Pelindungan, dan Zonasi. Ayat 22 pasal 1 disebutkan bahwa

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

Ayat 23 undang-undang Cagar Budaya disebutkan :

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya

Ayat 26 berbunyi :

Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

Seperti diketahui bahwa status kepemilikan sumberdayabudaya *tangible* berupa bangunan kuna terdiri atas perorangan, yayasan, pemerintah, dan kelompok agama yang menguasai bangunan kuna. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan yang mengarah pada upaya pelestarian bangunan kuna pada pihak-pihak tersebut. Pendekatan dilakukan secara personal dan instansional yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Secara personal, dilakukan oleh para pemerhati bangunan kuna dan lembaga swadaya masyarakat, yang didukung secara instansional oleh BP3, akademisi dan pemerintah daerah, memberi pengarahan mengenai pentingnya pemeliharaan dan pelestarian bangunan kuna. Hal ini penting dilakukan terutama pada bangunan rumah tinggal yang status kepemilikannya dikuasai secara perseorangan, sebab muncul fenomena menjual bangunan kuna yang mereka kuasai akibat tidak sanggup menanggung pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terus naik. Solusi dapat ditempuh dengan memberi keringanan biaya PBB pada pihak-pihak yang menguasai bangunan kuna. Sebagai bentuk terima kasih atas usaha pelestarian, pemerintah selayaknya memberi *reward* kepada pemilik atau yang menguasai bangunan bersejarah yang masih terawat karena telah mendukung program pelestarian bangunan bersejarah. Pemberian *reward* akan memberi motivasi bagi pemilik atau pihak yang menguasai bangunan bersejarah lainnya untuk menjaga, merawat dan me-

lestarikan bangunan bersejarah.

Agar upaya perlindungan bangunan bersejarah dapat dicapai secara maksimal, maka penegakan dan pelaksanaan hukum (*law enforcement*) menjadi penting. Untuk itu perangkat perundangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah, harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat utamanya yang memiliki atau menguasai bangunan bersejarah. Sosialisasi mengenai perundangan yang mengatur perlindungan bangunan bersejarah, akan memberi pemahaman kepada masyarakat dari segi perangkat perundangan. Pemahaman akan adanya undang-undang akan menjadi salah satu strategi dalam pelestarian bangunan bersejarah.

Re Identitas Kota Makassar

Kawasan kota kuno Makassar adalah penanda perkembangan dan pertumbuhan kota, yang perlu direkonstruksi. Rekonstruksi dimaksudkan agar secara terus menerus sepanjang waktu, bangunan (bersifat *tangible*) di kawasan kota kuno dapat menjadi media membangun kembali identitas kota bersejarah.

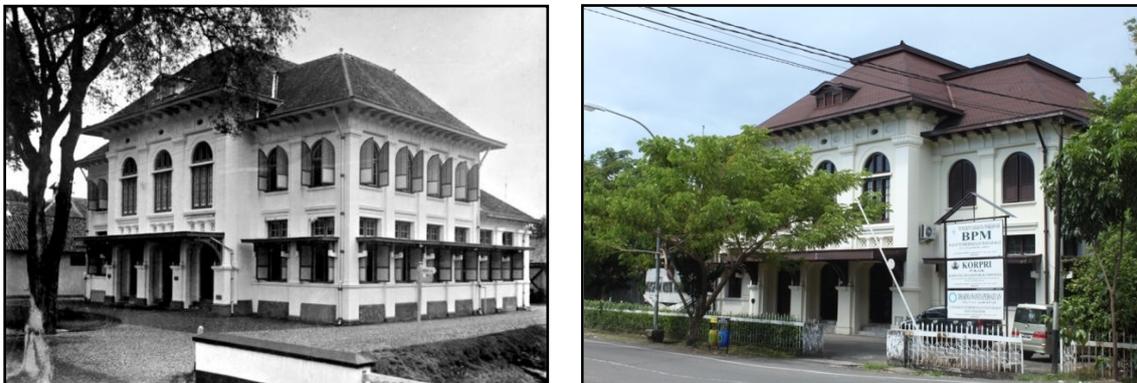
Dari data tentang nama jalan, dan nama kampung pada zaman kolonial, serta nama gedung yang terdapat di Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Mariso, dapat diperoleh gambaran tentang kawasan kota kuno (*historic urban area*). Ketiga kecamatan tersebut perlu mendapat perhatian sebagai kawasan yang harus dilindungi. Perlindungan dan pelestarian kawasan ini berupa *single building* atau kelompok bangunan, dan kawasan. Secara teknis, pada plang nama jalan yang ada sekarang mencantumkan pula nama jalan pada zaman dulu. Disarankan juga menuliskan nama jalan dengan menggunakan huruf Lontarak (aksara Bugis-Makassar). Demikian halnya dengan nama beberapa kampung seperti Kampung Melayu, Kampung Wajo, *Negory Vlaardingen*, Kampung Beru, Kampung Arab, dan Kampung Ambon, juga diberi papan informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan huruf Lontarak. Langkah tersebut untuk memudahkan pengenalan kawasan kota kuno dan mensosialisasikan aksara Lontarak kepada masyarakat Kota Makassar, khususnya kepada generasi muda.

Gedung baru yang menempati bekas lahan bangunan kuno, diberi papan informasi mengenai nama gedung, foto dan deskripsi singkat gedung kuno tersebut. Sementara untuk bangunan yang masih bertahan hingga sekarang, akan diberi plakat dan papan yang memuat nomor inventarisasi sebagai bangunan kuno, nama gedung atau bangunan, serta fungsinya di masa lalu. Plakat tersebut dipasang pada dinding luar masing-masing bangunan, sehingga mudah dikenali oleh masyarakat luas.

Dengan rekonstruksi tersebut, maka kawasan kota kuno Makassar menjadi *museum in-situ* dan *open space* arsitektur di Kota Makassar. Masyarakat dapat mengapresiasi dan menggali pengetahuan mengenai arsitektur di Kota Makassar yang beragam, misalnya kekhazanahan arsitektur bangunan kolonial dan arsitektur Tionghoa. Selain itu terdapat kearifan-kearifan para pendahulu Kota Makassar dalam merencanakan kota. Bentuk kearifan tersebut adalah penempatan bangunan pemerintahan di sekitar Benteng Rotterdam dan pengelompokan tempat tinggal berdasarkan suku bangsa, seperti Kampung Melayu, Kampung Wajo, *Negory Vlaardingen*, Kampung Beru, Kampung Arab, dan Kampung Ambon. Kearifan lain yang dapat dipelajari adalah perilaku adaptif orang-orang Eropa khususnya Belanda dalam mendirikan bangunan yang mengadopsi unsur-unsur lokal, dengan mendirikan bangunan yang memiliki jendela dan ventilasi yang banyak untuk memperlancar sirkulasi udara.

Pengetahuan lain yang didapatkan adalah kronologi perkembangan Kota Makassar melalui bangunan kuno, hingga menjadi sebuah kota, ataupun fungsi bangunan yang

menandai peristiwa penting, serta segenap perkembangan status administrasi dari zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan. Contoh bangunan tersebut Gedung *Gemeentehuis* dibangun pada tahun 1918 oleh pemerintah Belanda untuk difungsikan sebagai Kantor Walikota Makassar pertama yakni, J. E. Dan Brink.



Gambar 1. Foto gedung Gemeentehuis yang saat ini difungsikan sebagai Museum Kota Makassar.

Bangunan kuna di Kota Makassar merupakan ikon kota, yang keberadaannya dapat diterima oleh lapisan masyarakat manapun dan dari generasi ke generasi. Melalui bangunan kuna beberapa aspek kehidupan dapat diungkap seperti aspek sosial, aspek agama dan aspek politik masyarakat Kota Makassar. Aspek sosial yang ditunjukkan oleh bangunan kuna adalah perbedaan proses pengadilan antara orang-orang pribumi dengan orang-orang Eropa, Cina dan kaum bangsawan. Bangunan yang dapat menunjukkan perbedaan tersebut adalah Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang dulu bernama *Raad van Justitia* dan *Landraad*. *Raad van Justitia* yang menghadap ke Jalan Kartini digunakan untuk proses pengadilan bagi orang-orang Eropa, Cina dan kaum bangsawan. Sedangkan *Landraad* yang menghadap ke Jalan Amannagappa, berfungsi untuk pengadilan orang-orang pribumi. Aspek sosial lain yang dapat diungkapkan adalah pengelompokan pemukiman berdasarkan suku bangsa. Pengelompokan tersebut tidak menyebabkan pertentangan dan masyarakat tetap hidup rukun satu sama lain meskipun berbeda suku. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pola pengelompokan pemukiman tersebut merupakan salah satu bukti masyarakat Kota Makassar sejak dulu menerima keragaman suku bangsa (multikultur).

Di awal abad ke-20 berbagai suku bangsa telah bermukim di Kota Makassar diantaranya Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Cina, Arab, Melayu, India, Jawa, Banjar, Minahasa, Sangir, Ambon, Timor, Madura, Tanimbar, dan Buton. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pedagang, imam, tukang, buruh, pegawai, nelayan, tentara, polisi, pelayan toko, tukang kayu, tukang sepatu, tukang pangkas rambut, dan pandai emas. Pekerjaan atau profesi yang mereka tekuni mencirikan asal suku bangsanya dan fenomena ini berlanjut hingga sekarang. Misalnya, orang Bugis bekerja sebagai pedagang, orang Madura bekerja sebagai tukang pangkas rambut, dan orang Banjar berprofesi sebagai tukang jahit. Kehadiran berbagai suku bangsa tersebut sangat berperan dalam sektor perekonomian di Kota Makassar dan berperan pula dalam pembentukan identitas Kota Makassar sebagai kota yang multietnis.

Aspek agama yang dapat diungkapkan di kota kuna Makasar adalah berdirinya bangunan keagamaan sejak abad abad ke-18 hingga awal abad ke-20, yang menandakan bahwa saat itu aspek agama sangat penting. Beberapa suku bangsa telah mendirikan

bangunan keagamaan yang saling berdekatan, seperti etnis Cina mendirikan klenteng, orang Belanda mendirikan gereja dan orang Melayu membangun mesjid. Meskipun terdapat perbedaan agama diantara mereka, namun tidak menimbulkan konflik bahkan mereka dapat hidup rukun dan saling menghormati dan menghargai. Pembelajaran kepada mengenai perbedaan agama dan keyakinan sangat penting untuk mengatasi konflik yang mengakibatkan perpecahan.



Gambar 2. Foto kondisi Klenteng Ibu Agung Bahari di masa dulu dan sekarang

Pola penempatan bangunan kuna dapat pula mengungkap aspek politis. Pada masa awal perkembangan Kota Makassar, Benteng Rotterdam tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan namun juga difungsikan sebagai permukiman pejabat tinggi Pemerintah Belanda. Di dalam benteng, beberapa unit bangunan digunakan sebagai gereja, gudang mesiu, kediaman gubernur, kantor gubernur, balai kota, kediaman pendeta, kantor kepala bagian perdagangan, kantor pusat perdagangan, barak militer, dan gudang. Di sekeliling benteng terdapat parit keliling yang berfungsi untuk memutus hubungan penduduk di dalam benteng dengan dunia luar dan menghindari serangan penduduk lokal, dari arah utara, timur dan selatan. Di akhir abad ke-19, saat keadaan mulai aman, beberapa bangunan didirikan di luar dan terletak di sekitar Benteng Rotterdam diantaranya gereja, kediaman gubernur, kantor gubernur dan balai kota. Aspek politis lain yang dapat diungkapkan adalah diberinya lokasi pemukiman bagi pedagang Melayu di bagian utara Benteng Rotterdam. Keistimewaan ini diberikan oleh karena keahlian orang Melayu dalam hal berdagang yang diperlukan oleh bangsa Belanda.

Selain aspek sosial, aspek agama dan aspek politis yang dapat diungkap di kawasan kota kuna, kekayaan gaya arsitektur bangunan kuna di Kota Makasar juga menjadi *landmark* kota. Bangunan kuna juga dapat memperkuat karakter kota dan telah memiliki ikatan emosional dengan warga Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat pada beberapa bangunan yang diberi nama (*naming*) oleh masyarakat Kota Makassar. Contoh Benteng Rotterdam yang disebut dengan Benteng *Panynyua* (penyu) dan Rumah Kodok untuk menyebut rumah tinggal *queenshead*, yang berbentuk setengah lingkaran.

Faktor ini dapat menjadi salah satu kekuatan untuk melindungi bangunan bersejarah sebab *naming* oleh masyarakat berarti bangunan kuna telah menjadi bagian dari hidup masyarakat dan tercipta rasa memiliki terhadap warisan budaya *tangible* tersebut. Dengan demikian, memperkenalkan warisan budaya kepada masyarakat, adalah cara yang tepat dan efektif untuk memberi pendidikan kepada publik, guna mendukung pemeliharaan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari konservasi warisan budaya, yaitu memberikan identitas atau jati diri yang lebih mengakar kepada sebuah kelompok atau

suku bangsa, sebagai sebuah legitimasi dan secara umum bertujuan untuk membuat manusia merasa lebih baik, dan memperoleh rasa aman (Howard, 2003).



Gambar 3. Foto Benteng Rotterdam di tahun 1920 yang oleh masyarakat Makassar disebut sebagai Benteng Panynyua (Penyu) karena bentuknya menyerupai Penyu.

Seperti yang telah dipahami, identitas kota tidak hanya menyangkut fisik, akan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial budaya masyarakat yang bermukim di dalamnya. Untuk itu dibutuhkan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan budaya *intangibile*. Pembelajaran dan pemahaman mengenai budaya *intangibile*, ditujukan untuk mengantisipasi berkurangnya nilai-nilai budaya yang dapat mengakibatkan hilangnya identitas kota yang merupakan representasi ciri khas masyarakat. Setiap pembangunan fisik yang dilakukan harus diiringi dengan pembangunan mental masyarakat yang berbasis dan berwawasan budaya, sehingga terbentuk identitas jati diri, dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat tidak hilang.

Salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai budaya *intangibile* di Kota Makassar adalah membina dan memberdayakan lembaga-lembaga adat dan komunitas budaya. Upaya ini akan memudahkan proses pengenalan kembali nilai-nilai seni dan budaya kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang (*intrageneration and intergeneration*). Sebab kesenian adalah ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu sendiri.

Dalam prakteknya, disediakan ruang pementasan yang memadai untuk atraksi seni budaya (*performing arts*) di tempat-tempat strategis dalam Kota Makassar setiap akhir pekan, sehingga kegiatan berbudaya ini dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Kegiatan berbudaya lainnya adalah penyelenggaraan festival seni dan pameran kerajinan secara berkala atau periodik. Kegiatan tersebut dikemas secara inovatif kreatif sehingga mendukung pemunculan karakteristik Kota Makassar sebagai kota yang berbudaya. Penyelenggaraan festival seni dan pameran kerajinan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat secara interaktif belajar berkesenian dan menggali pengetahuan tentang berbagai macam kesenian tradisional yang dipentaskan.

Proses pengenalan kembali nilai-nilai seni dan budaya kepada generasi muda, dilakukan dengan metode belajar melihat, mengetahui, melakukan dan belajar (*seeing, knowing, doing dan learning*). Metode ini tidak sekedar mengajarkan berkesenian tetapi juga diajak mengkritisi perlengkapan, mengenal gerakan dan latar sejarah kesenian tersebut. Keuntungan metode ini diterapkan adalah mengajarkan kepada generasi muda dalam memahami kebudayaannya sambil mengasah agar berpikir secara inovatif dan kreatif.

KESIMPULAN

Sejarah perkembangan Kota Makassar tidak lepas dari peran kolonialisasi yang pernah berlangsung di Indonesia. Di masa tersebut sejumlah bangunan fisik dan sarana pendukung telah berdiri. Bangunan fisik dan sarana pendukung tersebut berupa bangunan kantor, sarana pendidikan, rumah tinggal, tempat ibadah, rumah sakit, bangunan militer dan fasilitas umum.

Laju pembangunan dan modernisasi yang terjadi di Kota Makassar tidak dapat dihindari dan dapat mengakibatkan hilangnya unsur-unsur budaya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dibutuhkan pembentukan kembali identitas kota. Pembentukan identitas dapat dilakukan melalui media sumberdaya budaya (*tangible/intangible*) yang ada di Kota Makassar.

Sumberdaya budaya *tangible* di Kota Makassar berupa bangunan kuna sedangkan unsur budaya *intangible* meliputi kesenian, organisasi sosial dan bahasa. Melalui bangunan kuna, beberapa hal dapat diketahui diantaranya membantu menginterpretasi karakter manusia melalui bentuk arsitektur, dapat mengungkap beberapa aspek sosial, aspek agama dan aspek politik dan menjadi pembangkit semangat persatuan dan kesatuan sebab bangunan kuna merupakan ikon Kota Makassar yang telah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Kota Makassar, sehingga bangunan kuna menjadi salah satu sarana penumbuh dan penguat identitas masyarakat.

Untuk mengantisipasi berkurangnya nilai-nilai budaya yang merupakan representasi ciri khas masyarakat, diperlukan pemahaman mengenai unsur budaya *intangible* seperti kesenian, organisasi sosial dan bahasa kepada masyarakat untuk membentuk manusia yang berbudaya. Pemahaman mengenai kesenian, organisasi sosial dan bahasa merupakan pengembangan tradisi lokal sebagai landasan terwujudnya identitas budaya lokal yang memantapkan identitas budaya bangsa.

Sumberdaya budaya (*tangible* dan *intangible*) menjadi media pendidikan, pengetahuan dan dalam memahami berbagai hal mengenai kehidupan di masa lalu, untuk cerminan di masa yang akan datang. Sejak dini pendidikan, pengetahuan dan pemahaman mengenai Kota Makassar secara keseluruhan akan berdampak pada tertanamnya rasa memiliki dan turut berperan menjaga dan melestarikan sumberdaya budaya. Pendidikan, pengetahuan dan pemahaman yang didapat merupakan upaya pemupukan nasionalisme, tertanamnya identitas budaya bangsa dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kota Makassar. Jika hal ini dapat dicapai maka arus modernisasi yang begitu cepat dapat terfilterisasi, sehingga tidak memberikan dampak yang terlalu merugikan.

Pelindungan dan pelestarian sumberdaya budaya dimaksudkan untuk memunculkan karakteristik Kota Makassar sebagai kota berbudaya. Selain itu, pelindungan dan pelestarian sumberdaya budaya akan memudahkan dalam pemanfaatannya dalam rangka membangun identitas menuju masyarakat yang berbudaya.

Potensi budaya yang dimiliki Kota Makassar sudah saatnya mendapat perhatian untuk dilindungi dan dilestarikan. Bangunan bersejarah di kawasan kota lama seharusnya dilindungi dengan menerbitkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur peruntukan lahan dan bangunan di kawasan tersebut. Hal ini penting agar kawasan kota lama dapat dipertahankan eksistensinya meskipun laju perkembangan kota terus berjalan.

Sementara untuk perlindungan dan pelestarian budaya *intangible* dapat dilakukan dengan cara menghidupkan sanggar-sanggar kesenian dan menggiatkan kesenian-kesenian tradisional. Upaya ini akan memberi pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai budaya Kota Makassar yang beragam dan sebagai kota yang sejak dulu dihuni oleh berbagai macam suku bangsa.

Semua usaha tersebut diatas kembali lagi kepada keseriusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan di bidang budaya. Tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah setempat maka usaha tersebut akan sia-sia. Demikian pula halnya dengan dukungan masyarakat Sulawesi selatan, secara umum dan masyarakat Kota Makassar pada khususnya, sebagai pemilik sumberdaya budaya sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka. Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke -17*. Makassar: Inninnawa.
- Corteseo, Armãdo. 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires . An Account of The East, from The Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512 -1515*. Kraus Reprint Limited. Nendeln/Liechtenstein.
- Danisworo, Muhammad. 1997. "The Meaning of Preservation and Conservation", dalam Eko Budihardjo (ed). *Preservation and Conservation of Cultural Heritage in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mattulada. 1991. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510 -1700)*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places : The Basic of Heritage Planning, for Managers, Landowners and Administrators*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX. Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Reid, Anthony 2004. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Renfrew, Colin dan Paul Bahn. 1991. *Archaeology, Theories, Method and Practice*. London: Thames and Hudson Ltd.
- Slametmulyana. 1979. *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Sumalyo, Yulianto. 1999. "Ujung Pandang Perkembangan Kota dan Arsitektur Pada Akhir Abad 17 Hingga Awal Abad 20", dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed.). *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*, Ecole Francaise d'extreme-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tanudirjo, Daud Aris & Widya Nayati Dipojoyo. 1988. "Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pendugaan Dampak dan Baku Mutu Cagar Budaya dalam AMDAL", *Makalah Seminar Sehari*, Balai Arkeologi Yogyakarta.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2004. "Kriteria Penetapan Benda Cagar Budaya", dalam *Makalah Disampaikan dalam Rapat Penyusunan Pedoman Penetapan Benda Cagar Budaya*. Cirebon.

Wikantiyoso, Respati. 2001. "Panduan Rancang Kota Sebagai Pengendali Pembangunan Kota", *Jurnal Jurusan Arsitektur* Universitas Merdeka Malang.